

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENA (PAHLAWAN EKONOMI NUSANTARA) DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO

The Implementation of the PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) Assistance Program for the Development of Micro Enterprises in Kanigaran District Probolinggo City

Veronica Sri Astuti Nawangsih¹
Eko Yudianto Yunus²
Mila Manjasari^{3*}

¹Universitas Panca Marga Probolinggo

*corresponding author:
manjasarimila999@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah adalah Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang bertujuan mengembangkan usaha mikro bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program PENA dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis implementasi mengacu pada model Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PENA telah berjalan cukup baik melalui komunikasi yang efektif, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarlembaga yang jelas. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, keterbatasan akses pemasaran, kenaikan harga bahan baku, persaingan usaha, dan terbatasnya jumlah pendamping. Oleh karena itu, penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas kewirausahaan, dan perluasan akses pasar diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci:

Bantuan ekonomi
Implementasi kebijakan
Kemiskinan
Pengembangan usaha mikro
Pemberdayaan masyarakat

Keywords:

Community empowerment
Micro enterprise development
Policy implementation
Poverty
Social assistance

Abstract

Poverty remains a major development challenge in Indonesia, requiring sustainable economic empowerment policies. One of the government's initiatives is the Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Program, which aims to strengthen micro-enterprises among low-income communities. This study examines the implementation of the PENA Program for micro-enterprise development in Kanigaran District, Probolinggo City. A descriptive qualitative approach was employed using Edwards III's policy implementation model, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the program has been implemented reasonably well, supported by effective communication, adequate resources, strong commitment from implementers, and clear inter-agency coordination. Nevertheless, several challenges remain, including limited managerial capacity among beneficiaries, restricted market access, rising raw material prices, increasing business competition, and an insufficient number of facilitators. Strengthening mentoring, entrepreneurial capacity building, and market access is therefore essential to improve program effectiveness in promoting sustainable micro-enterprise development and poverty alleviation.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index>

Submite: 07-07-2026

Accepted: 20-07-2026

Published: 27-07-2026

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang dihadapi hampir seluruh negara,

baik negara maju maupun berkembang. Meskipun berbagai negara telah mencatat penurunan tingkat kemiskinan, jutaan penduduk dunia masih mengalami

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Bank Dunia melaporkan bahwa ratusan juta penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah belum memperoleh akses yang memadai terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (World Bank, 2025).

Sejalan dengan agenda global, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OECD menyatakan bahwa penguatan UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan (OECD, 2023).

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional meskipun menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai sekitar 8,47%, yang berarti masih terdapat jutaan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi. Komitmen tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program “Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)” yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial sebagai transformasi bantuan sosial dari pendekatan konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan kapasitas manajerial, serta perluasan akses pemasaran. Melalui pendekatan tersebut, Program PENA diharapkan mampu mendorong keluarga penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri sehingga secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Pemberdayaan usaha mikro dipilih karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sebagian besar unit usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya literasi digital. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bantuan modal yang disertai pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan produktivitas usaha serta kesejahteraan masyarakat, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi program di tingkat daerah.

Permasalahan tersebut masih terlihat di Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2024 memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,79%. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,45%, sedangkan Kota Probolinggo mencatat angka sekitar 6,18%. Meskipun lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten, masih terdapat masyarakat di Kota Probolinggo yang mengalami keterbatasan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro yang menghadapi kesulitan memperoleh modal, mengembangkan usaha,

serta meningkatkan daya saing. Kecamatan Kanigaran sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Probolinggo memiliki potensi usaha mikro yang cukup besar, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha sehingga memerlukan dukungan program pemberdayaan yang efektif.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, maupun dampak program pemberdayaan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Program PENA dalam pengembangan usaha mikro, terutama dengan menelaah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi di tingkat daerah, masih relatif terbatas. Padahal keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasi yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana Program PENA dijalankan pada tingkat implementasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam memberdayakan usaha mikro.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi, serta menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara

(PENA) dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Edwards III, yang meliputi empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi pendamping Program PENA, aparatur Kecamatan Kanigaran, penerima manfaat Program PENA, serta pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran program.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berlangsung terus-menerus hingga diperoleh temuan yang valid.

HASIL

Implementasi Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat melalui pengembangan usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan program meliputi tahapan pendataan calon penerima manfaat, asesmen kelayakan usaha, penyusunan proposal usaha, verifikasi administrasi, penetapan penerima bantuan, penyaluran bantuan, serta pendampingan dan monitoring pascapenyaluran. Seluruh tahapan tersebut melibatkan Dinas Sosial,

Pemerintah Kecamatan, pemerintah kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta penerima manfaat sebagai pelaku usaha mikro.

Komunikasi

Berdasarkan dimensi komunikasi, implementasi Program PENA telah berlangsung melalui mekanisme sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan yang relatif baik. Informasi mengenai tujuan program, persyaratan penerima, mekanisme pengajuan bantuan, serta bentuk pendampingan disampaikan kepada calon penerima manfaat melalui pendamping sosial dan pemerintah kelurahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat memahami prosedur pelaksanaan program karena memperoleh penjelasan secara langsung dari pendamping sebelum proses pengajuan bantuan dilakukan.

Koordinasi antarpelaksana juga berjalan cukup efektif. Pendamping Program Keluarga Harapan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan Dinas Sosial sehingga proses verifikasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain itu, komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pendampingan membantu penerima manfaat memperoleh solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat beberapa penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme administrasi maupun pengelolaan bantuan produktif sehingga memerlukan pendampingan secara lebih intensif.

Sumber Daya

Pelaksanaan Program PENA didukung oleh ketersediaan bantuan modal usaha dan keberadaan pendamping sosial sebagai sumber daya utama. Bantuan yang diterima dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, menambah peralatan produksi, memperluas jenis usaha, maupun

meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing usaha mikro.

Pendamping sosial memiliki peran penting dalam melakukan asesmen, memberikan konsultasi usaha, serta memantau perkembangan usaha penerima manfaat. Keberadaan pendamping membantu memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program.

Namun demikian, penelitian menemukan adanya keterbatasan jumlah pendamping dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat yang harus didampingi. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga beberapa pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan lanjutan, terutama dalam aspek manajemen usaha dan pemasaran.

Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana program memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendamping sosial secara aktif melakukan kunjungan lapangan, memberikan arahan kepada penerima manfaat, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program.

Di sisi lain, penerima manfaat menunjukkan respons yang positif terhadap pelaksanaan Program PENA. Sebagian besar penerima memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya dan berupaya meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan usaha produktif.

Walaupun demikian, tingkat kemampuan penerima manfaat dalam mengelola usaha masih beragam. Sebagian pelaku usaha belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai, khususnya dalam pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan strategi pemasaran sehingga perkembangan usahanya belum optimal.

Struktur Birokrasi

Implementasi Program PENA didukung oleh struktur birokrasi yang telah memiliki pembagian tugas dan mekanisme koordinasi yang jelas. Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap pengelolaan program, sedangkan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pendamping sosial menjalankan fungsi koordinasi, verifikasi, serta pendampingan kepada masyarakat.

Kejelasan pembagian tugas tersebut mempermudah pelaksanaan setiap tahapan program, mulai dari proses pendataan hingga monitoring perkembangan usaha. Selain itu, koordinasi antarlembaga berjalan cukup baik sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat Implementasi

Di samping berbagai capaian tersebut, penelitian menemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi Program PENA. Hambatan utama berasal dari rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, keterbatasan akses pemasaran, meningkatnya persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, serta menurunnya daya beli masyarakat. Selain faktor internal penerima manfaat, keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan proses pembinaan belum dapat dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh penerima manfaat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PENA di Kecamatan Kanigaran telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, kapasitas kewirausahaan penerima manfaat, serta kondisi lingkungan usaha yang terus berubah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Kanigaran secara umum telah

berlangsung sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah. Program tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan modal usaha, tetapi juga mengintegrasikan proses pendampingan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Program PENA telah mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pengembangan ekonomi, bukan sekadar penerima bantuan sosial.

Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), dimensi komunikasi menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Program PENA. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama pendamping sosial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, mekanisme, serta pemanfaatan bantuan produktif. Komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan juga mempermudah koordinasi antara pelaksana program dan penerima manfaat sehingga berbagai kendala administratif dapat diselesaikan secara lebih cepat. Temuan ini memperkuat pandangan Edwards III bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh aktor merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dimensi sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal dan keberadaan pendamping sosial merupakan sumber daya utama yang menentukan keberhasilan implementasi program. Bantuan modal memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan pendamping berperan dalam memberikan arahan serta memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program. Namun demikian, keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan intensitas pembinaan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya manusia yang menjalankan

program. Temuan tersebut sejalan dengan konsep Edwards III yang menegaskan bahwa kualitas implementasi sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia.

Dimensi disposisi juga memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi Program PENA. Komitmen pendamping sosial dalam memberikan pembinaan serta kemauan penerima manfaat untuk mengembangkan usaha menjadi modal penting dalam mendukung pencapaian tujuan program. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa kemampuan manajerial penerima manfaat masih menjadi tantangan yang cukup besar. Sebagian pelaku usaha belum mampu menyusun pencatatan keuangan secara sederhana, melakukan perencanaan usaha, maupun mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaksana, tetapi juga oleh kapasitas penerima manfaat dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan.

Pada dimensi struktur birokrasi, implementasi Program PENA didukung oleh pembagian tugas yang relatif jelas antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pendamping sosial. Kejelasan mekanisme kerja tersebut memudahkan pelaksanaan setiap tahapan program mulai dari pendataan hingga monitoring. Koordinasi antarlembaga juga mampu meminimalkan hambatan administratif sehingga proses implementasi dapat berlangsung sesuai ketentuan. Temuan ini memperkuat argumentasi Edwards III bahwa struktur birokrasi yang jelas akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan melalui pembagian kewenangan yang tegas dan koordinasi yang baik.

Meskipun implementasi program telah berjalan cukup baik, penelitian menemukan sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan Program PENA. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek implementasi kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh

kondisi lingkungan usaha. Rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, keterbatasan akses pemasaran, meningkatnya persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, serta menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan yang memengaruhi perkembangan usaha penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak dapat dicapai hanya melalui pemberian bantuan modal, melainkan memerlukan dukungan ekosistem usaha yang kondusif serta pendampingan yang berkelanjutan.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah bahwa Program PENA telah menunjukkan fungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun efektivitasnya lebih ditentukan oleh kualitas proses implementasi dibandingkan besarnya bantuan yang diberikan. Dengan kata lain, keberhasilan program bergantung pada kemampuan pelaksana membangun komunikasi yang efektif, menyediakan pendampingan yang memadai, memperkuat kapasitas kewirausahaan penerima manfaat, serta menjaga koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendamping sosial, peningkatan kompetensi kewirausahaan penerima manfaat, dan perluasan akses pemasaran menjadi strategi yang perlu diprioritaskan agar tujuan pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang lebih menitikberatkan pada besaran bantuan atau peningkatan pendapatan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan Program PENA. Dengan demikian, penguatan aspek implementasi perlu menjadi perhatian utama dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dalam pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo secara umum telah berjalan dengan baik. Berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh komunikasi yang efektif melalui sosialisasi dan pendampingan, ketersediaan sumber daya berupa bantuan modal dan pendamping sosial, komitmen pelaksana dalam menjalankan program, serta struktur birokrasi yang didukung oleh koordinasi antarlembaga dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Faktor-faktor tersebut memungkinkan program terlaksana sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi Program PENA masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, keterbatasan akses pemasaran, meningkatnya persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, serta terbatasnya jumlah pendamping. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, penguatan kapasitas kewirausahaan penerima manfaat, dan dukungan lingkungan usaha yang kondusif.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan aspek implementasi perlu menjadi perhatian utama dalam pengembangan Program PENA. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan jumlah pendamping, memperluas pelatihan kewirausahaan, serta memfasilitasi akses pemasaran agar keberlanjutan usaha mikro dapat terjaga. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi Program PENA pada wilayah yang lebih luas atau membandingkan antar daerah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun mixed methods, sehingga diperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan percepatan pengentasan kemiskinan.

REFERENSI

- Ariany, R., & Putera, R. E. (2020). Implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 145–158.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024*. <https://jatim.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data UMKM Tahun 2023*. <https://kemenkopukm.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)*. <https://kemensos.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R., & Purnomo, E. P. (2021). Policy implementation in community empowerment programs: A public administration perspective. *Journal of Governance*, 6(2), 115–128.
- OECD. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8a5d32b1-en>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

- Prasetyo, P. E. (2020). The role of micro, small and medium enterprises in poverty reduction and economic development in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 13(2), 327–341. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.24826>
- Rachmawati, E., & Hidayat, R. (2022). Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 34–47.
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet: Pathways Out of the Polycrisis*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2141-2>